

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chaawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Radja Grafindo Persada Jakarta
- Arief Barda Nawawi, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bassar M. Sudrajat, 2007, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, CV. Remaja Karya Bandung.
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Napitupulu, 2010, *KPK in Action*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, PT Softmedia, Medan.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergesaran Paradigma Pemidanaan*, CV Lubuk Agung. Bandung.
- Hadikusuma H. Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Ibrahim Johny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2011, Malang: Bayumedia Publishing, Bandingan Juga Dengan, Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kanter E.Y, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kartanegara Satochid, dkk, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda*, Balai Lektur Mahasiswa,
- Lamitang P.A.F. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2005. Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Jakarta, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Natsir Muhammad, 2012 *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam Sistem Pemidanaan Di Aceh*, USU Press, Medan.
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di era globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Poernomo Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sutendi Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tresna R, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.

Winarno Dwi, 2006, *Hukum yang Berkembang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.

### **D. Skripsi, Tesis dan Disertasi.**

Aulia Annisa, *Penerima Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Tinjauan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2015, hlm. 4.

Bagus Yuliawan, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Dilakukan Bersama-sama*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 1.

Fuad Akbar Yamin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013, hlm. 44.

Margaretha Yesicha Priscyllia, *Pemiskinan Koruptor Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Tahun 2014, hlm. 4.

Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum:Skripsi*, Balikpapan, 2010, hlm. 1 .

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 4

#### **E. Jurnal, Artikel**

Lincoln Stone, “*Criminal Forfeiture of Attorney's Fees under Rico and CCE*”, *Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy*, Volume 2, Issue 2 Symposium on Criminal Justice, February 2014, hal. 1421.

Marwan Effendy, “*Peran Kejaksaan Dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya Dengan ruu Perampasan Aset*”, Makalah Disampaikan pada acara Lokakarya: Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dephukham RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan IKA-UI, di Hotel Sahid Jaya-Solo, Tanggal 18 Agustus 2009, hal. 10.

Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hal. 157.

Santo Barri Gultom, *Disparitas Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, International Press Intitute (IPI). hlm. 8-9.

Yunus Husein, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hlm. 26.

Beni Kurnia Ilahi, *Muhammad Iksan Alia. Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal, UBELAJ, Volume 2 Number 2, Oktober 2017, hlm. 187.

- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013, hlm. 32.
- Arizon Mega Jaya, *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Cepalo Volume 1*, Nomor 1, Juli-Desember 2017. hlm. 21.
- Kausar Dwi Kusuma, “*Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Mutual Legal Assistance*”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang 2013, hlm. 9.
- Sigit Prabawa Nugraha, *Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society. hlm. 993-994.
- Avital Blanchard, “*The Next Step in Interpreting Criminal Forfeiture*”, *Cardozo Law Review*, Vol. 28, No.3, Tahun 2006, hal. 1428.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 167.
- Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32.
- David Torrance, “*Evidence of Character in Civil and Criminal Proceedings*”, *Yale Law Journal*, Heinonline-12 Yale L.J. 352 1902-1903, hal. 357.
- Marwan Effendy, “*Peran Kejaksaan Dalam Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya Dengan rru Perampasan Aset*”, Makalah Disampaikan pada acara Lokakarya: *Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dephukham RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan IKA-UI, di Hotel Sahid Jaya-Solo, Tanggal 18 Agustus 2009, hal. 10.
- Pradipto, Rimawan *Memiskinkan Koruptor*, Surat Kabar Harian Kompas, 22 Agustus 2012.

Stefan D. Cassella (I), “*Criminal Forfeiture Procedure in 2015: An Annual Survey of Developments in the Case Law*”, *Criminal Law Bulletin*, Date: 8/22/2015, hal. 2.

Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Volume 11 No. 1 Mei 2021, hlm. 146.

Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2012, hlm. 168.

Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm. 170-174.

## F. Website

Sultoni, *Memiskinkan Koruptor Melalui Undang-Undang Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/memiskinkan-koruptor-melalui-uu-pajak>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.21 WIB. hlm. 2.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita->, diakses tanggal 2 Juni 2022, Artikel, Romli Atmasasmita, “*Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*”, Dipublikasikan di website hukumonline, Tanggal 14 Desember 2009.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tpu-bagian-1>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2022. Pukul 15.21 WIB.

Abdillah Rifai, *Penyitaan Harta Kekayaan Koruptor*, [https://www.academia.edu/3685492/penyitaan\\_harta\\_kekayaan\\_koruptor](https://www.academia.edu/3685492/penyitaan_harta_kekayaan_koruptor). Diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 13.09 WIB. hlm. 1.

Hari Purwadi, *Pemiskinan Koruptor*, Jawa Pos, 22 November 2010, hlm. 2, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/25/pemiskinan-koruptor/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 15.48 WIB.

[http://jdih.pptk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/NA-RUU-Perampasan\\_Aset.pdf](http://jdih.pptk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/NA-RUU-Perampasan_Aset.pdf). diakses tanggal 1 Juni 2022.

<https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-1-tahun-2006/> diakses  
tanggal 1 Maret 2023